

**ANALISIS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN MINAHASA TENGGARA***ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT REVENUES AND EXPENDITURES IN SOUTH AND SOUTHEAST MINAHASA*

Oleh :

**Elvira Diana Worotitjan<sup>1</sup>****Linda Lambey<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi

Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

<sup>1</sup>[elvira\\_worotitjan@yahoo.com](mailto:elvira_worotitjan@yahoo.com)<sup>2</sup>[lindalambey@yahoo.com](mailto:lindalambey@yahoo.com)

**Abstrak** : Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi didalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola pendapatannya dikatakan sangat baik dan efektif ini dibuktikan dari perhitungan efektifitas PAD dan dalam analisis varians yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam mengelola anggaran belanja dapat dikatakan baik dan efisien. Ini dilihat dari analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja menunjukkan pemerintah telah melaksanakan efisiensi anggaran dan tidak ada realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan.

**Kata kunci:** *anggaran pendapatan dan belanja daerah, efektivitas, efisiensi.*

**Abstract** : Financial management is closely related to the implementation of decentralization within governance. Important aspects in the implementation of regional autonomy and decentralization are financial management and the local budget. The purpose of this study is to analyze the implementation of the budget revenue and expenditure in the South Minahasa District and Southeast Minahasa. The analytical method used was descriptive method. The results indicated that South Minahasa District Government and Southeast Minahasa District Government have managed their earnings efficiently and effectively. They are shown by good results in calculating the effectiveness of PAD. In addition, the analysis of variance also showed that both local governments were able to earn their actual revenues higher than budget revenues. Furthermore, South Minahasa district government and Southeast Minahasa district government are also capable to manage their budgets and efficiently. It is shown by the expenditure variance analysis and expenditure efficiency ratio indicating the government has implemented budget efficiency and no expenditures were higher than budgeted.

**Keywords:** *budget revenues and expenditures, effectiveness, efficiency.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu entitas karena dapat menjadi daerah yang mandiri dan mampu mengembangkan potensinya sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayahnya, sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah (Octovido, 2014).

Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD adalah suatu hal yang sangat vital bagi daerah dan harus disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan memperhatikan skala prioritas (Azhari, 2015:65).

Anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah (Mandey, 2015). Pengelolaan keuangan daerah yang jujur, demokratis, efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Ariana, 2011).

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Akuntansi

Menurut *American Institute of Certified Public Accounting* (AICPA), Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umunya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

### Konsep Akuntansi Sektor Publik

Halim (2010:97) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang benar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Sedangkan menurut Mahmudi (2011:22) akuntansi sektor publik merupakan praktik akuntansi yang berlaku dalam organisasi sektor publik yang dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada organisasi bisnis maupun sektor sosial.

### Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011 Pasal 1 ayat (8) Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah suatu rencana operasional keuangan daerah, disatu pihak menggambarkan penerimaan pendapatan dan dilain pihak merupakan pengeluaran untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam satu tahun anggaran. Chalit, *et. al* (2011:32), pengertian APBD adalah program pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun mendatang, yang akan diwujudkan dalam satu bentuk uang.

### **Konsep Pendapatan dan Belanja Daerah**

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU.No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Jadi pendapatan daerah secara luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Mangowal, 2013). Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

### **Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah**

Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan untuk menilai efektifitas, efisiensi, dan ekonomi dari pendapatan daerah antara lain dengan cara berikut ini.

1. Analisis Varians (selisih) Anggaran Pendapatan
2. Derajat Desentralisasi
3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
4. Rasio Efektifitas PAD
5. Analisis Varians Belanja
6. Rasio Efisiensi Belanja

### **Penelitian Terdahulu**

Ariana (2011) dalam penelitiannya yang berjudul : Analisis Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur yang bertujuan untuk mengetahui tentang nilai efektifitas, efisiensi dan ekonomis dari anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif, efisiensi dan ekonomis telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan karakteristik yang ada pada alat analisis.

Mandey (2015) dalam penelitiannya yang berjudul : Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah dikaitkan dengan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah Kota Bitung yang diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan untuk tahun anggaran 2006-2010. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja pemerintah Kota Bitung dalam khususnya pada PAD dilihat dari tingkat kemandirian masih rendah dan memiliki kecenderungan menurun. Jika dilihat dari keefektifan, secara umum dapat dikatakan sangat efektif karena dari tahun 2006–2010 rata-rata efektifitas Pendapatan Asli Daerah yaitu 102,38%. Dilihat dari tingkat keserasian, secara umum belum serasi karena kinerja Pendapatan Asli Daerah pada belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung. Dan jika dilihat dari tingkat pertumbuhan, secara umum efektif karena dari tahun 2006–2010 rata-rata pertumbuhan sebesar 95,70%.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2014:7) menyebutkan metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Arikunto (2010:234) penelitian deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh dari perusahaan/instansi sehingga dapat memberikan gambaran dengan keadaan yang sebenarnya.

**Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kabupaten Minahasa Tenggara. Waktu penelitian pada bulan Maret 2016 sampai bulan Mei 2016.

**Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Permohonan Penelitian
2. Disposisi Pimpinan
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data Penelitian
5. Analisa Penerapan

**Metode Pengumpulan Data****Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Kualitatif yang berupa :
  - a. Gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara..
2. Data Kuantitatif yang berupa :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 - 2014.
  - b. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2012 - 2014.

**Sumber Data**

Sumber data dibedakan menjadi dua jenis (Sugiyono, 2014:193) yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pihak Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengenai pokok permasalahan yang sedang diteliti.
2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah melalui buku-buku literatur, jurnal, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas oleh penulis.

**Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut.

1. Observasi yaitu meninjau dan mengamati secara langsung untuk memperoleh data dan mengetahui lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.
2. Teknik wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian.

**Metode Analisis**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data-data yang dibutuhkan kemudian setiap data yang ada di proses sedemikian rupa sehingga data yang diperoleh menjadi lebih sederhana, selanjutnya data di analisis kembali untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh gambaran yang lebih jelas maka setiap data disajikan secara lengkap sehingga diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan yang dialami tentang penerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian ditarik kesimpulan dengan hasil penelitian yang dilakukan. Adapun tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : analisis varians pendapatan, derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan daerah.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen pada bagian keuangan yaitu data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

### Pembahasan

#### Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan.

**Tabel 1. Varians Pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2012 – 2014**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varians/Selisih	(%)
2012	Rp. 537.329.647.572,00	Rp. 535.044.213.864,00	Rp. 2.285.433.708,00	100,43
2013	Rp. 604.614.969.408,00	Rp. 601.087.914.509,00	Rp. 3.527.054.899,00	100,59
2014	Rp. 684.371.721.501,00	Rp. 690.625.976.980,00	Rp.(6.254.255.479,00)	99,09
<b>Rata-rata</b>				<b>100,04</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 1 memperlihatkan data varians anggaran pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan periode 2012-2014. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran di atas, pada tahun 2012 Kabupaten Minahasa Selatan memiliki realisasi pendapatan daerah sebesar Rp.537.329.647.572,00 dengan target anggaran sebesar Rp.535.044.213.864,00 sehingga varians yang diperoleh sebesar Rp.2.285.433.708,00 atau 100,43% dari total APBD. Pada tahun 2013 selisih realisasi pendapatan dengan jumlah yang dianggarkan meningkat sebesar Rp.3.527.054.899,00 atau 100,59% dari total APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan sangat baik dan sangat efektif. Namun pada tahun 2014, untuk perolehan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan memiliki realisasi anggaran lebih rendah dari target anggaran. Selisih keduanya sebesar Rp.6.254.255.479,00 atau 99,09% dari total APBD. Secara umum dilihat dari analisis varians pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan baik dimana rata-rata persentase 100,04%.

**Tabel 2. Varians Pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2012 – 2014**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Varians/Selisih	(%)
2012	Rp. 389.916.145.821,00	Rp. 382.904.802.651,00	Rp.(7.011.343.170,00)	98,20
2013	Rp. 465.993.124.023,00	Rp. 462.242.732.689,01	Rp. 3.750.391.333,99	100,81
2014	Rp. 554.132.244.539,08	Rp. 547.911.760.986,00	Rp. 6.220.483.553,08	101,14
<b>Rata-rata</b>				<b>100,05</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 2 memperlihatkan data varians anggaran pendapatan Kabupaten Minahasa Tenggara periode 2012-2014. Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2012 secara umum terdapat selisih anggaran pendapatan dengan realisasi yang bersaldo negatif. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terealisasi pada tahun 2012

sebesar Rp.7.011.343.170,00 atau sebesar 98,2% dari total APBD. Hal ini disebabkan karena realisasi anggaran lebih rendah dari target anggaran. Pada tahun 2013 terjadi perubahan yang cukup signifikan. Selisih anggaran pendapatan bersaldo positif. Selisih anggaran pendapatan yang dapat terealisasi pada tahun 2013 sebesar Rp.3.750.391.333,99 atau sebesar 100,81% dari total APBD. Realisasi pendapatan pada tahun 2014 melebihi jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp.6.220.483.553,08 atau 101,14% dari total APBD. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pendapatan sangat baik dan sangat efektif. Selisih realisasi ini merupakan selisih yang diharapkan (*favourable variance*) oleh pemerintah daerah.

### Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Berikut perhitungan derajat desentralisasi untuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014. (Derajat Desentralisasi =  $\frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ ).

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi **Kabupaten Minahasa Selatan** periode 2012-2014:

2012	= Rp. 10.620.087.945 : Rp. 537.329.647.572 x 100% = 1,97%
2013	= Rp. 14.406.092.809 : Rp. 604.614.969.408 x 100% = 2,38%
2014	= Rp. 26.137.234.620 : Rp. 684.371.721.501 x 100% = 3,81%

Berdasarkan perhitungan derajat desentralisasi di atas, Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun anggaran 2012 memiliki rasio derajat desentralisasi sebesar 1,97%, dan pada tahun 2013 juga sebesar 2,38% sedangkan pada tahun anggaran 2014 sebesar 3,81%. Dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui bahwa dalam tiga tahun anggaran mengalami peningkatan tetapi tingkatannya masih sangat kecil. Dimana rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2012-2014 yaitu 2,72%. Ini menunjukkan kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah masih sangat kecil.

Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi **Kabupaten Minahasa Tenggara** periode 2012-2014:

2012	= Rp. 4.844.083.588 : Rp. 382.904.802.651 x 100% = 1,26%
2013	= Rp. 8.920.156.536 : Rp. 465.993.124.023 x 100% = 1,91%
2014	= Rp. 14.633.333.049,08 : Rp. 554.132.244.539,08 x 100% = 2,64%

Berdasarkan perhitungan di atas, rasio derajat desentralisasi yang dihasilkan Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2012 sebesar 1,26%, tahun 2013 sebesar 1,91% dan pada tahun 2014 sebesar 2,64%. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2012-2014 yaitu 1,93%. Hal ini menunjukkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam penyelenggaraan desentralisasi mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi tingkatannya masih sangat kecil.

### Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total penerimaan daerah. (Rasio ketergantungan daerah =  $\frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{total pendapatan daerah}} \times 100\%$ ).

Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah **Kabupaten Minahasa Selatan** periode 2012-2014:

2012	= Rp. 526.709.559.627,00 : Rp. 537.329.647.572,00 x 100% = 98%
2013	= Rp. 518.402.298.599,00 : Rp. 604.614.969.408,00 x 100% = 86%
2014	= Rp. 654.665.686.881,00 : Rp. 684.371.721.501,00 x 100% = 96%

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2012 sebesar 98%, tahun 2013 sebesar 86% dan tahun 2014 sebesar 96%. Dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya masih sangat bergantung terhadap pemerintah pusat/propinsi. Namun pada tahun 2013 rasio ketergantungan keuangan daerah mulai menurun menjadi 86% karena meningkatnya total pendapatan daerah menjadi Rp.604.614.969.408,00 dan pada tahun 2014 rasio

ketergantungan keuangan daerah kembali meningkat sebesar 96% itu artinya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat/propinsi.

Hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah **Kabupaten Minahasa Tenggara** periode 2012-2014:

2012	= Rp. 377.008.328.011,00 : Rp. 382.904.802.651,00 x 100% = 98%
2013	= Rp. 453.965.193.987,00 : Rp. 465.993.124.023,00 x 100% = 97%
2014	= Rp. 532.885.931.332,00 : Rp. 554.132.244.539,08 x 100% = 96%

Rasio Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2012 sebesar 98%, tahun 2013 sebesar 97% dan pada tahun 2014 sebesar 96%. Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami penurunan 1 % pada periode tahun anggaran 2012-2014. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap pemerintah pusat atau propinsi mengalami penurunan.

### Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas pendapatan asli daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah yang dianggarkan. (Rasio efektivitas PAD = Realisasi penerimaan PAD : Target penerimaan PAD x 100%).

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD **Kabupaten Minahasa Selatan** periode 2012-2014:

2012	= Rp. 10.620.087.945,00 : Rp. 8.499.800.000,00 x 100% = 125%
2013	= Rp. 14.406.092.809,00 : Rp. 13.435.194.704,00 x 100% = 107%
2014	= Rp. 26.137.234.620,00 : Rp. 22.457.922.250,00 x 100% = 116%

**Tabel 3. Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2012 - 2014**

No	Periode	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Keterangan
1	Tahun 2012	125	Sangat Efektif
2	Tahun 2013	107	Sangat Efektif
3	Tahun 2014	116	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 3 menunjukkan nilai efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun anggaran 2012 sebesar 125% dapat dikatakan sangat efektif karena berada pada predikat >100%. Pada tahun 2013 rasio efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar 107%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 18%. Namun efektivitas PAD di tahun 2013 masih dikatakan sangat efektif karena rasio yang dihasilkan masih mencapai >100%, sekalipun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya (2012). Sedangkan pada tahun 2014 efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Selatan adalah sebesar 116% menunjukkan kinerja PAD lebih baik dari tahun sebelumnya.

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD **Kabupaten Minahasa Tenggara** periode 2012-2014:

2012	= Rp. 4.844.083.588,00 : Rp. 6.617.787.375,00 x 100% = 73%
2013	= Rp. 8.920.156.536,00 : Rp. 8.036.079.225,01 x 100% = 111%
2014	= Rp. 14.633.333.049,08 : Rp. 9.553.709.008,00 x 100% = 153%

**Tabel 4. Nilai Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2012 - 2014**

No	Periode	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (%)	Keterangan
1	Tahun 2012	73	Tidak Efektif
2	Tahun 2013	111	Sangat Efektif
3	Tahun 2014	153	Sangat Efektif

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 4 menunjukkan nilai efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun anggaran 2012, rasio efektivitas PAD sebesar 73% menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi PAD di tahun 2012 tidak efektif karena berada pada predikat <75%. Jika dibandingkan pada tahun 2013 dan 2014 rasio efektivitas PAD Kabupaten Minahasa Tenggara mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu masing-masing sebesar 111% tahun 2013 dan 153% tahun 2014. Hal ini dikatakan sangat efektif karena telah melampaui target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan efektivitas dari tahun sebelumnya (2012). Dampak positif perhitungan rasio efektivitas PAD ini bagi keuangan yaitu dari perhitungan analisis rasionya dapat diketahui dengan cermat bagaimana perbandingan antara target dan realisasi PAD pada tiap tahunnya sehingga dapat dinilai oleh pemerintah kapan target dan realisasinya ini berada di posisi sangat efektif bagi keuangan daerahnya.

#### Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis perbedaan/selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.

**Tabel 5. Varians Belanja Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2012 - 2014**

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Varians/Selisih	(%)
2012	Rp. 525.891.166.484,00	Rp. 555.932.935.432,00	Rp.(30.041.768.948,00)	94,60
2013	Rp. 561.242.693.084,00	Rp. 615.297.895.264,00	Rp.(54.055.202.180,00)	91,21
2014	Rp. 689.167.009.246,38	Rp. 749.596.805.200,00	Rp.(60.429.795.953,62)	91,94
<b>Rata-rata</b>				<b>92,58</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 5 memperlihatkan data varians anggaran belanja Kabupaten Minahasa Selatan periode 2012-2014. Pada tahun 2012 Kabupaten Minahasa Selatan memiliki realisasi belanja sebesar Rp. 525.891.166.484,00 dengan target anggaran sebesar Rp. 555.932.935.432,00 sehingga varians yang diperoleh sebesar Rp.30.041.768.948,00 atau 94,6% dari total APBD. Kemudian pada tahun 2013 selisih realisasi belanja dengan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.54.055.202.180,00 (Rp.561.242.693.084,00–Rp.615.297.895.264,00) atau 91,21% dari total APBD. Sedangkan pada tahun 2014 diperoleh varians belanja sebesar Rp.60.429.795.953,62 (Rp.689.167.009.246,38–Rp.749.596.805.200,00) atau 91,94% dari total APBD. Pemerintah daerah akan dinilai baik kinerja belanjanya apabila realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Secara umum kinerja pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 dikatakan baik dilihat dari analisis varians belanja daerah dan tidak ada realisasi belanja yang melebihi dari yang dianggarkan (*favourable variance*). Ini menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam pengendalian anggaran yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan ini merupakan suatu prestasi.

**Tabel 6. Varians Belanja Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2012 - 2014**

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Varians/Selisih	(%)
2012	Rp. 406.754.612.272,00	Rp. 426.828.954.882,05	Rp.(20.074.342.610,05)	95,30
2013	Rp. 442.697.400.843,00	Rp. 475.305.732.129,06	Rp.(32.608.331.286,06)	93,14
2014	Rp. 514.588.586.630,00	Rp. 583.829.935.910,05	Rp.(69.241.349.280,05)	88,14
<b>Rata-rata</b>				<b>92,19</b>

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 6 menunjukkan data varians anggaran belanja Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2012-2014. Berdasarkan data varians belanja Kabupaten Minahasa Tenggara, secara keseluruhan terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Pada tahun 2012 anggaran belanja terserap 95,3% dengan varians belanja yang diperoleh sebesar Rp. 20.074.342.610,05 dari total APBD. Pada tahun 2013 selisih realisasi belanja dengan jumlah yang dianggarkan diperoleh sebesar Rp.32.608.331.286,06 atau 93,14% dari total APBD. Sedangkan pada tahun 2014 diperoleh varians belanja sebesar Rp.69.241.349.280,05 atau 88,14% dari total APBD. Secara umum seluruh komponen belanja menunjukkan bahwa realisasi belanja yang dianggarkan tidak melebihi target yang dianggarkan, hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2012-2014 dikatakan baik (*favourable variance*).

#### Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. (Rasio efisiensi belanja = realisasi belanja : anggaran belanja x 100%).

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja **Kabupaten Minahasa Selatan** periode 2012-2014:

2012 = Rp. 525.891.166.484,00 : Rp. 555.932.935.432,00 x 100% = 94,6%

2013 = Rp. 561.242.693.084,00 : Rp. 615.297.895.264,00 x 100% = 91,21%

2014 = Rp. 689.167.009.246,38 : Rp. 749.596.805.200,00 x 100% = 91,94%

**Tabel 7. Nilai Rasio Efisiensi Belanja pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Periode Tahun 2012 - 2014**

No	Periode	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Keterangan
1	Tahun 2012	94,6	Efisiensi Anggaran
2	Tahun 2013	91,21	Efisiensi Anggaran
3	Tahun 2014	91,94	Efisiensi Anggaran

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai rasio efisiensi belanja Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2012 sebesar 94,6% tahun 2013 sebesar 91,21% dan tahun 2014 sebesar 91,94%. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanja. Pada tahun 2012-2014 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka dibawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk tiga tahun tersebut.

Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja **Kabupaten Minahasa Tenggara** periode 2012-2014:

2012 = Rp. 406.754.612.272,00: Rp. 426.828.954.882,05x 100% = 95,3%

2013 = Rp. 442.697.400.843,00: Rp. 475.305.732.129,06x 100% = 93,14%

2014 = Rp. 514.588.586.630,00: Rp. 583.829.935.910,05x 100% = 88,14%

**Tabel 8. Nilai Rasio Efisiensi Belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Periode Tahun 2012 – 2014**

No	Periode	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Keterangan
1	Tahun 2012	95,3	Efisiensi Anggaran
2	Tahun 2013	93,14	Efisiensi Anggaran
3	Tahun 2014	88,14	Efisiensi Anggaran

Sumber: Data Olahan 2016

Tabel 8 menunjukkan nilai rasio efisiensi belanja Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2012 sebesar 95,3%, tahun 2013 sebesar 93,14% dan tahun 2014 sebesar 88,14%. Dilihat dari perhitungan rasio efisiensi belanja, menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Pada tahun 2012-2014 semua angka pada rasio efisiensi menunjukkan angka dibawah 100% sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada pemborosan dalam penganggaran belanja untuk tiga tahun tersebut.

**Tabel 9. Perbandingan Rasio Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara Periode Tahun 2012-2014**

JENIS RASIO	KABUPATEN MINAHASA SELATAN			KABUPATEN MINAHASA TENGGARA		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Analisis Varians Anggaran Pendapatan	100,43% (favourable)	100,59% (favourable)	99,09% (unfavourable)	98,2% (unfavourable)	100,81% (favourable)	101,14% (favourable)
Derajat Desentralisasi	1,97% (mampu)	2,38% (mampu)	3,81% (mampu)	1,26% (mampu)	1,91% (mampu)	2,64% (mampu)
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	98% (bergantung)	86% (bergantung)	96% (bergantung)	98% (bergantung)	97% (bergantung)	96% (bergantung)
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	125% (sangat efektif)	107% (sangat efektif)	116% (sangat efektif)	73% (tidak efektif)	111% (sangat efektif)	153% (sangat efektif)
Analisis Varians Belanja	94,6% (favourable)	91,21% (favourable)	91,94% (favourable)	95,3% (favourable)	93,14% (favourable)	88,14% (favourable)
Rasio Efisiensi Belanja	94,6% (efisien)	91,21% (efisien)	91,94% (efisien)	95,3% (efisien)	93,14% (efisien)	88,14% (efisien)

**PENUTUP****Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dalam analisis varians anggaran pendapatan untuk kedua kabupaten tersebut dapat dikatakan kinerjanya baik karena pemerintah daerah mampu merealisasikan pendapatannya melebihi dari yang telah dianggarkan. Kemandirian pemerintah dalam melaksanakan anggaran pendapatan daerah pada analisis derajat desentralisasi baik Kabupaten Minahasa Selatan maupun Minahasa Tenggara mengalami kenaikan disetiap tahunnya maka semakin naik pula kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Sekalipun dinilai berada pada tingkat kemampuan yang kurang. Hal ini dilihat dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif kecil. Begitu pula dengan rasio ketergantungan daerah yang menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara masih sangat bergantung pada pemerintah pusat/propinsi. Selanjutnya dari hasil perhitungan perbandingan antara target dan realisasi PAD mengalami kenaikan disetiap tahun maka rasio efektivitas PAD berada pada posisi sangat efektif baik untuk Kabupaten Minahasa Selatan maupun Minahasa Tenggara.

Pemerintah daerah baik untuk Kabupaten Minahasa Selatan maupun Minahasa Tenggara dalam mengelola anggaran belanja dikatakan baik dan efisien hal ini terlihat dalam analisis varians belanja dan rasio efisiensi belanja bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan penghematan belanja ditiap tahunnya dan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi dari target yang dianggarkan.

**Saran**

Saran yang dapat peneliti sampaikan, adalah:

1. Adanya perhitungan pendapatan dan belanja daerah yang telah dianalisis, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih melaksanakan anggaran secara efektif dan efisien..
2. Adanya perhitungan rasio-rasio keuangan daerah yang telah dianalisis, maka diharapkan pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan kecenderungan yang terjadi sebagai bahan pertimbangan didalam pengambilan keputusan pada waktu yang akan datang.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ariana, Hermawati. 2011. *Analisis Pendapatan dan Belanja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Skripsi.Universitas Mulawarman. Kabupaten Kutai Timur.
- Arikunto, 2010. *Manajemen Penelitian*. Edisi kesebelas. PT. Rineka. Jakarta.
- Azhari, Aziz Samudra. 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chalit, R. A., Ahmad. F., Alteng. S., & M. Suparmoko. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Penerbit Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mandey, Kevin R., M. 2015. *Analisis Kinerja Pendapatan Asli Daerah Dikaitkan Dengan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA Vol.3 No.3 September 2015. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Mangowal, Jessy C. 2013. *Pendapatan Daerah Pengaruhnya Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

- Octovido, Irsandy. 2014. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Jurnal. Malang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&B*. Cetakan Kedua Puluh. Alfabeta, Bandung.

